



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 76) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN BANJARWANGI
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan Perangkat Daerah meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perangkat Daerah selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan

pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar Perangkat Daerah yang sesuai dengan Perangkat Daerah serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarwangi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarwangi
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian
Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan Perangkat Daerah, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi Perangkat Daerah dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Perangkat Daerah tidak menjadi capaian Perangkat Daerah atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran Perangkat Daerah dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,772,555,265	43,32	767.793.633
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,478,400	100,00	7.478.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,478,400	100,00	7.478.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,456,614,065	48,45	705.738.655
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,447,651,465	48,13	696.776.055
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,962,600	100,00	8.962.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	0,00	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	0,00	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	108,152,800	37,21	40.244.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,940,000	50,00	3.470.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,204,300	30,59	17.195.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,500,000	0,00	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,430,000	39,13	2.516.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,627,200	48,66	791.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,551,300	58,02	5.541.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,900,000	57,88	5.730.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	100,00	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,000,000	0,00	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,260,000	45,85	14.331.978
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000	35,91	3.231.978
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,260,000	49,30	2.100.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,000,000	50,00	9.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,050,000	0,00	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,200,000	0,00	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,850,000	0,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126,571,500	42,28	53.514.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96,252,500	41,87	26.352.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,238,500	99,53	13.176.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83,014,000	32,68	27.129.000

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30,319,000	43,57	13.209.000
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30,319,000	43,57	13.209.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,425,800	100,00	13.425.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,425,800	100,00	13.425.600
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13,425,800	100,00	13.425.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160,695,000	49,08	78.875.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92,400,000	54,33	50.200.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92,400,000	54,33	50.200.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,400,000	39,71	8.100.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,400,000	39,71	8.100.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47,895,000	42,96	20.575.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	47,895,000	42,96	20.575.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165,000,000	27,43	45.252.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	165,000,000	27,43	45.252.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15,000,000	0,00	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	150,000,000	30,17	45.252.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,952,300	68,10	29.932.800
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43,952,300	68,10	29.932.800
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21,400,000	87,76	18.780.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28,000,000	31,89	8.930.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4,647,000	47,83	2.222.800
Jumlah	2,282,199,865	44,52	1.015.993.033

Sumber : Perubahan RENSTRA SKPD/KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. **2,282,199,865,00**, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.015.993.033,00** atau sebesar **44,52 %**

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan

supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,20% untuk target kinerja dan 50,00% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50 %	43,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 %	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 %	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 %	48,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 %	48,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 %	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 %	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 %	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 %	37,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 %	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 %	30,59
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50 %	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50 %	39,13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 %	48,66
Fasilitas Kunjungan Tamu	50 %	58,02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 %	57,88
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 %	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50 %	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 %	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	45,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50 %	35,91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 %	49,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 %	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 %	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50 %	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50 %	42,28
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50 %	41,87
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50 %	99,53
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50 %	32,68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50 %	43,57

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50 %	43,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50 %	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50 %	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 %	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50 %	49,08
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 %	54,33
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 %	54,33
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 %	39,71
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50 %	39,71
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 %	42,96
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50 %	42,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50 %	27,43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	27,43
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 %	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50 %	30,17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50 %	68,10
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 %	68,10
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50 %	87,76
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	50 %	31,89
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	50 %	47,83
JUMLAH	50 %	44,52

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG	1,772,555,265	43,32	767.793.633

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,478,400	100,00	7.478.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,478,400	100,00	7.478.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,456,614,065	48,45	705.738.655
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,447,651,465	48,13	696.776.055
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,962,600	100,00	8.962.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	0,00	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	0,00	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	108,152,800	37,21	40.244.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,940,000	50,00	3.470.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,204,300	30,59	17.195.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,500,000	0,00	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,430,000	39,13	2.516.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,627,200	48,66	791.800
Fasilitas Kunjungan Tamu	9,551,300	58,02	5.541.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,900,000	57,88	5.730.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	100,00	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,000,000	0,00	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,260,000	45,85	14.331.978
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000	35,91	3.231.978
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,260,000	49,30	2.100.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,000,000	50,00	9.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,050,000	0,00	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,200,000	0,00	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,850,000	0,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126,571,500	42,28	53.514.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96,252,500	41,87	26.352.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,238,500	99,53	13.176.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83,014,000	32,68	27.129.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30,319,000	43,57	13.209.000
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30,319,000	43,57	13.209.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,425,800	100,00	13.425.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,425,800	100,00	13.425.600

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13,425,800	100,00	13.425.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160,695,000	49,08	78.875.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92,400,000	54,33	50.200.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92,400,000	54,33	50.200.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,400,000	39,71	8.100.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,400,000	39,71	8.100.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47,895,000	42,96	20.575.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	47,895,000	42,96	20.575.000
JUMLAH	165,000,000	27,43	45.252.000

Sumber : PERANGKAT DAERAH Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 27,43%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara Perangkat Daerah dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam Perangkat Daerah, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi Perangkat Daerah.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 27,43% untuk target kinerja, dan 50,00% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program

Renja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50 %	43,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 %	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 %	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 %	48,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 %	48,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 %	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 %	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 %	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 %	37,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 %	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 %	30,59
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50 %	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50 %	39,13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 %	48,66
Fasilitas Kunjungan Tamu	50 %	58,02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 %	57,88
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 %	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50 %	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 %	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	45,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50 %	35,91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 %	49,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 %	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 %	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50 %	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50 %	42,28
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50 %	41,87
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50 %	99,53
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50 %	32,68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50 %	43,57
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50 %	43,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50 %	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50 %	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 %	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50 %	49,08
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 %	54,33

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 %	54,33
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 %	39,71
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50 %	39,71
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 %	42,96
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50 %	42,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50 %	27,43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	27,43
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 %	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50 %	30,17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50 %	68,10
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 %	68,10
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50 %	87,76
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	50 %	31,89
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	50 %	47,83
JUMLAH	50 %	44,52

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Banjarwangi Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarwangi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7										
	Unsur Kewilayahan									
7	01									
	Kecamatan									
7	01	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
7	01	01	201	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Tunjangan ASN Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	1 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	100 %	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	100 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan Test Tolak Ukur Indikator Keluaran Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	umlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	100 %
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang diberikan pengawasan dan pembinaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Lembaga Kemasyarakatan											
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %

Sumber : Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.282.199.865,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.015.993.033,00 atau mencapai 44,52 %. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.314.229.139,00	1.015.993.033,00	43,90
7.01.7.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.314.229.139,00	1.015.993.033,00	43,90
7.01.7.01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.804.584.539,00	767.793.633,00	42,55
7.01.7.01.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.478.400,00	7.478.400,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.478.400,00	7.478.400,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.578.400,00	3.578.400,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.578.400,00	3.578.400,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.578.400,00	3.578.400,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	750.000,00	750.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.479.680.739,00	696.776.055,00	47,09
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.479.680.739,00	696.776.055,00	47,09
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	954.271.057,00	447.337.484,00	46,88
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	619.610.031,00	313.516.700,00	50,60
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	619.610.031,00	313.516.700,00	50,60
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	80.798.036,00	40.319.724,00	49,90
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.798.036,00	40.319.724,00	49,90
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88.656.000,00	47.360.000,00	53,42
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88.656.000,00	47.360.000,00	53,42
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.574.000,00	1.995.000,00	55,82
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.574.000,00	1.995.000,00	55,82
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.424.240,00	21.798.420,00	45,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.424.240,00	21.798.420,00	45,96
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.931.073,00	431.385,00	22,34
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.931.073,00	431.385,00	22,34
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.269,00	4.320,00	30,28
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.269,00	4.320,00	30,28
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	79.320.126,00	19.663.464,00	24,79
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.320.126,00	19.663.464,00	24,79
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.137.429,00	562.115,00	9,16
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.137.429,00	562.115,00	9,16
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.598.726,00	1.686.356,00	13,39
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.598.726,00	1.686.356,00	13,39
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.207.127,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.207.127,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	525.409.682,00	249.438.571,00	47,48
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	525.409.682,00	249.438.571,00	47,48
7.01.7.01.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	525.409.682,00	249.438.571,00	47,48
7.01.7.01.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.962.600,00	8.962.600,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.962.600,00	8.962.600,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	4.762.600,00	4.762.600,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.762.600,00	4.762.600,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.499.600,00	3.499.600,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.263.000,00	1.263.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.02.05.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	10.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.05.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.05.09.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.940.000,00	3.470.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	3.470.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	6.940.000,00	3.470.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.940.000,00	3.470.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.940.000,00	3.470.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.204.300,00	17.195.000,00	30,59
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.204.300,00	17.195.000,00	30,59
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	56.204.300,00	17.195.000,00	30,59
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	56.204.300,00	17.195.000,00	30,59
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.064.300,00	3.200.000,00	24,49

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.300.000,00	5.575.000,00	25,00
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.320.000,00	1.160.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.520.000,00	7.260.000,00	39,20
7.01.7.01.01.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.500.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.03.5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.500.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.03.5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.03.5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.430.000,00	2.516.000,00	39,13
7.01.7.01.01.01.2.06.05.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	2.516.000,00	39,13
7.01.7.01.01.01.2.06.05.1.02.01.	Belanja Barang	6.430.000,00	2.516.000,00	39,13
7.01.7.01.01.01.2.06.05.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.430.000,00	2.516.000,00	39,13
7.01.7.01.01.01.2.06.05.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.430.000,00	2.516.000,00	39,13
7.01.7.01.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.627.200,00	791.800,00	48,66
7.01.7.01.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.200,00	791.800,00	48,66
7.01.7.01.01.01.2.06.06.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.627.200,00	791.800,00	48,66
7.01.7.01.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.627.200,00	791.800,00	48,66
7.01.7.01.01.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.627.200,00	791.800,00	48,66
7.01.7.01.01.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	9.551.300,00	5.541.800,00	58,02
7.01.7.01.01.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.551.300,00	5.541.800,00	58,02
7.01.7.01.01.01.2.06.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	9.551.300,00	5.541.800,00	58,02
7.01.7.01.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.551.300,00	5.541.800,00	58,02
7.01.7.01.01.01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.551.300,00	5.541.800,00	58,02
7.01.7.01.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	9.900.000,00	5.730.000,00	57,88
7.01.7.01.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	5.730.000,00	57,88
7.01.7.01.01.01.2.06.09.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	5.730.000,00	57,88
7.01.7.01.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.900.000,00	5.730.000,00	57,88
7.01.7.01.01.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.900.000,00	5.730.000,00	57,88
7.01.7.01.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	201.000,00	201.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.1.02.01.	Belanja Barang	201.000,00	201.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	201.000,00	201.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	201.000,00	201.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.799.000,00	4.799.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.799.000,00	4.799.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.799.000,00	4.799.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.06.10.5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.799.000,00	4.799.000,00	100,00
7.01.7.01.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.1.02.01.	Belanja Barang	299.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	299.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	299.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.700.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.000.000,00	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	34.444.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.444.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.444.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	9.256.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	9.256.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.07.06.5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	9.256.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	3.231.978,00	35,91
7.01.7.01.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	3.231.978,00	35,91
7.01.7.01.01.01.2.08.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.000.000,00	3.231.978,00	35,91
7.01.7.01.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	3.231.978,00	35,91
7.01.7.01.01.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	9.000.000,00	3.231.978,00	35,91
7.01.7.01.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.260.000,00	2.100.000,00	49,30
7.01.7.01.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	2.100.000,00	49,30
7.01.7.01.01.01.2.08.03.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4.260.000,00	2.100.000,00	49,30
7.01.7.01.01.01.2.08.03.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.260.000,00	2.100.000,00	49,30
7.01.7.01.01.01.2.08.03.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.260.000,00	2.100.000,00	49,30
7.01.7.01.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	3.200.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.200.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.200.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	110.850.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.01.	Belanja Barang	665.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	665.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	665.600,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	6.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.184.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	40.484.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.484.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	40.484.400,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.700.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	63.700.000,00	-	-
7.01.7.01.01.01.2.09.09.5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	63.700.000,00	-	-
7.01.7.01.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.571.500,00	53.514.000,00	42,28
7.01.7.01.01.02.2.01.01.	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	13.238.500,00	13.176.000,00	99,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.238.500,00	13.176.000,00	99,53
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	7.738.500,00	7.676.000,00	99,19
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.738.500,00	7.676.000,00	99,19
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.476.000,00	2.476.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.262.500,00	5.200.000,00	98,81
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	83.014.000,00	27.129.000,00	32,68
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.014.000,00	27.129.000,00	32,68
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	54.364.000,00	14.079.000,00	25,90
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	54.364.000,00	14.079.000,00	25,90
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.196.000,00	3.196.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.683.000,00	9.683.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.315.000,00	1.200.000,00	91,25
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	40.170.000,00	-	-
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	23.400.000,00	7.800.000,00	33,33
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	7.800.000,00	33,33
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	7.800.000,00	33,33
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
7.01.7.01.01.02.2.02.01.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	30.319.000,00	13.209.000,00	43,57
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.319.000,00	13.209.000,00	43,57
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	6.069.000,00	3.009.000,00	49,58
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.069.000,00	3.009.000,00	49,58
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.964.000,00	1.982.000,00	50,00
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.105.000,00	1.027.000,00	48,79
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	20.400.000,00	10.200.000,00	50,00
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	10.200.000,00	50,00
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00	10.200.000,00	50,00
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	-	-
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	-	-
7.01.7.01.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.850.000,00	-	-
7.01.7.01.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.425.800,00	13.425.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	13.425.800,00	13.425.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.425.800,00	13.425.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	8.035.800,00	8.035.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.035.800,00	8.035.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200,00	-	-
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.794.000,00	3.794.000,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.241.600,00	4.241.600,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	5.390.000,00	5.390.000,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.390.000,00	5.390.000,00	100,00
7.01.7.01.01.03.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.390.000,00	5.390.000,00	100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.695.000,00	106.075.000,00	66,01
7.01.7.01.01.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	92.400.000,00	50.200.000,00	54,33
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	50.200.000,00	54,33
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.178.000,00	1.178.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.622.000,00	6.622.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	80.400.000,00	38.200.000,00	47,51
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	38.200.000,00	47,51
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	80.400.000,00	38.200.000,00	47,51
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.	KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSI NYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	20.400.000,00	8.100.000,00	39,71
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	8.100.000,00	39,71
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	8.000.000,00	4.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	4.000.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.790.000,00	1.895.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.210.000,00	2.105.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	1.400.000,00	20,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	1.400.000,00	20,00
7.01.7.01.01.04.2.02.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	1.400.000,00	20,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.	HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	47.895.000,00	47.775.000,00	99,75
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.895.000,00	47.775.000,00	99,75
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	37.311.800,00	37.191.800,00	99,68
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	37.311.800,00	37.191.800,00	99,68
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.781.800,00	5.781.800,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.210.000,00	4.210.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.320.000,00	27.200.000,00	99,56
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.583.200,00	10.583.200,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	500.000,00	500.000,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.083.200,00	1.083.200,00	100,00
7.01.7.01.01.04.7.03.02.5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.083.200,00	1.083.200,00	100,00
7.01.7.01.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.000.000,00	45.252.000,00	27,43
7.01.7.01.01.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	15.000.000,00	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	9.650.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.650.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.040.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.350.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.350.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	700.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.01.5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.650.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	150.000.000,00	45.252.000,00	30,17
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	45.252.000,00	30,17
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	104.150.000,00	24.702.000,00	23,72
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	104.150.000,00	24.702.000,00	23,72
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.570.000,00	3.476.000,00	25,62
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48.480.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	42.100.000,00	21.226.000,00	50,42
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.02.	Belanja Jasa	37.800.000,00	20.550.000,00	54,37
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	20.550.000,00	54,37
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000,00	4.950.000,00	75,00
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	15.600.000,00	50,00
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.050.000,00	-	-
7.01.7.01.01.05.2.01.08.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.050.000,00	-	-
7.01.7.01.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.952.300,00	29.932.800,00	68,10
7.01.7.01.01.06.2.01.02.	FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	21.400.000,00	18.780.000,00	87,76
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	18.780.000,00	87,76
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.400.000,00	4.900.000,00	76,56
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	4.900.000,00	76,56
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	10.080.000,00	90,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	10.080.000,00	90,00
7.01.7.01.01.06.2.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000,00	10.080.000,00	90,00
7.01.7.01.01.06.2.01.12.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	17.905.300,00	8.930.000,00	49,87
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.905.300,00	8.930.000,00	49,87
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.01.	Belanja Barang	7.405.300,00	3.680.000,00	49,69
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.405.300,00	3.680.000,00	49,69
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.169.000,00	1.580.000,00	49,86
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.236.300,00	2.100.000,00	49,57
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00
7.01.7.01.01.06.2.01.12.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00
7.01.7.01.01.06.2.01.13.	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	4.647.000,00	2.222.800,00	47,83
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.647.000,00	2.222.800,00	47,83
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.897.000,00	1.847.800,00	47,42
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.897.000,00	1.847.800,00	47,42
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.582.000,00	1.200.000,00	46,48
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.315.000,00	647.800,00	49,26
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.02.	Belanja Jasa	750.000,00	375.000,00	50,00
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	375.000,00	50,00
7.01.7.01.01.06.2.01.13.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	750.000,00	375.000,00	50,00

Sumber : SPJ Fungsional Kecamatan Banjarwangi Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan oleh beberapa factor, diantaranya adalah dikarenakan tahun anggaran belum habis dan penempatan anggaran kas nya setelah bulan juni. Selain itu, terdapat beberapa subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena karena memang didalam angkaran kas nya antara bulan januari sampai dengan bulan juni (yang ditandai merah harap disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah masing-masing).

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Banjarwangi Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Banjarwangi.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Diadakan nya kajian dan arahan dari pihak terkait dengan estimasi yang terukur dan mendasar, sehingga tidak lagi banyak perubahan dan pergeseran ;
2. Pihak terkait yang melakukan reuiu haruslah memberikan waktu yang lebih cukup untuk SKPD, dikarenakan selain bahan dan data yang terkadang sulit dan tercecer ;
3. Diadakannya Bimtek dan kajian bagi pejabat dan atau petugas perencana SKPD

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/ Kasi)				
				I	II	III	IV	8	9	10	11	12	13= 6+12	14=13/5 x 100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2022

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPERAN GKAT DAERAH	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Sesuai dengan capaian urusan SPM SKPD). Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi

23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian stunting, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Banjarwangi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarwangi Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarwangi berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut

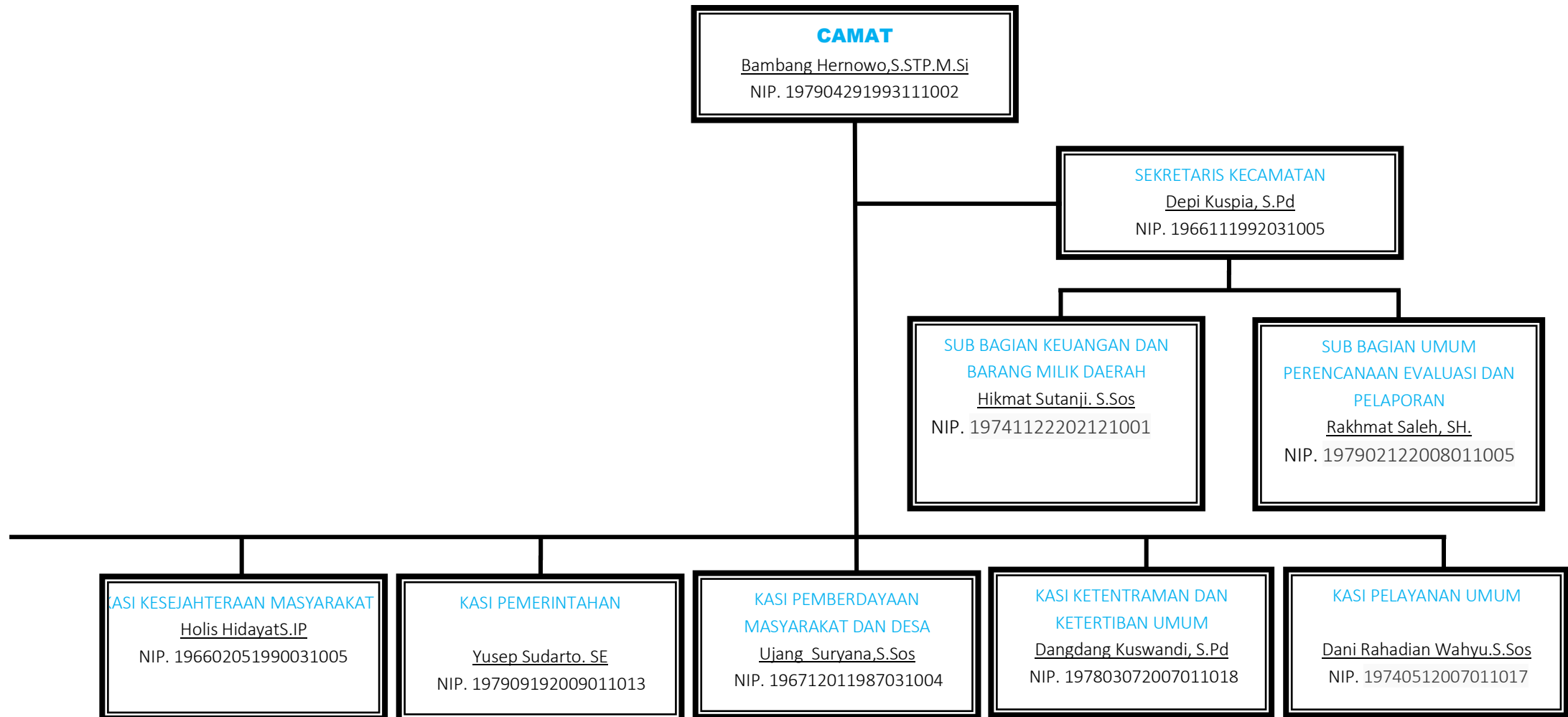
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut terdiri dari:

- 1) Camat;
Camat membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- 3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjarwangi

Sumber : PERBUP No.27 TAHUN 2016

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	82	82,5	83	83,5	81,75		82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	70	75	80	85	-		-	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	90	95	100	100	-		-	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	A	CC		B	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

(Selaraskan dengan gambaran permasalahan yang terjadi dan dialami di lingkungan kerja SKPD maupun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pelayanan/ permasalahan yang dihadapi di masyarakat, yang menimbulkan terjadi perubahan perencanaan misal isu bidang kesehatan/Penanganan stunting dan isu penanganan kebencanaan, peningkatan pendapatan/Umkm, fasilitasi Penanganan kemiskinan ekstrim, fasilitasi Pelayanan public, Penguatan Demokrasi, infrastruktur Dan peningkatan kapasitas SDM).

Jika memungkinkan isu-isu yang dijelaskan di dukung dengan data yang ada, karena isu yang dialami akan sangat berkaitan dengan persetujuan terhadap program yang diajukan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarwangi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- Program Perangkat Daerah /Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program Perangkat Daerah /Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;

- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi Jawa Barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/revisi rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, PD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Banjarwangi disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarwangi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan Perangkat Daerah maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan Perangkat Daerah. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 75 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.282.199.865,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Banjarwangi

Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.282.199.865,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 2.916.518.856,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 638.897.865,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.277.620.991,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.282.199.865,00 atau Bertambah Rp.4.578.874,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.
Review terhadap Rancangan Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Kecamatan Banjarwangi

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Perubahan PERANGKAT DAERAH					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7		Unsur Kewilayahan																
7	01	Kecamatan						2,916,518,856	2,277,620,991	2,282,199,865					2,940,017,856			
7	01	01						2,185,318,806	1,741,961,491	1,772,555,265				100 %	2,280,317,856			
7	01	01	201					12,299,950	7,828,400	7,478,400	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	100 %	12,500,000	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	201	01				12,299,950	7,828,400	7,478,400	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	2 Dokumen	12,500,000	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	202					1,586,704,456	1,403,666,591	1,456,614,065					2 Dokumen	1,676,668,856		
7	01	01	202	01				1,561,668,856	1,394,703,991	1,447,651,465	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	12 bulan	1,651,668,856	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	202	05				25,035,600	8,962,600	8,962,600	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	2 laporan	25,000,000	Kecamatan Banjarwangi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan		Nasional		Daerah							
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	15,120,000	10,000,000	10,000,000				1 laporan	15,000,000		
7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	15,120,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	3 Orang	15,000,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	266,494,400	130,156,500	108,152,800				1 Dokumen	271,449,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,046,400	6,940,000	6,940,000	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Paket	12,000,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	134,298,000	56,204,300	56,204,300	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Paket	134,500,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Paket	12,500,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,700,000	6,430,000	6,430,000	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Paket	25,700,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000	1,627,200	1,627,200	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Dokumen	2,250,000	Kecamatan Banjarnwangi
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	23,700,000	23,155,000	9,551,300	Kab. Garut, Banjarnwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 orang	23,700,000	Kecamatan Banjarnwangi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
												Umum		aparatur							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	56,000,000	18,300,000	9,900,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	2 laporan	56,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 dokumen	4,799,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	45,000,000	45,000,000	45,000,000					2 Jenis	45,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	2 unit	45,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	40,500,000	31,260,000	31,260,000					3 Jenis	40,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	4,500,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,260,000	4,260,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	4,500,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	219,200,000	114,050,000	114,050,000					2 Jenis	219,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
		Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	19,200,000	3,200,000	3,200,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	7 unit	19,200,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	110,850,000	110,850,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	210,500,000	138,812,500	126,571,500					100 %	210,500,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	118,000,000	103,238,500	96,252,500						2 Kegiatan	118,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	13,238,500	13,238,500	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	103,000,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	90,000,000	83,014,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Penyelenggaraan PATEN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92,500,000	35,574,000	30,319,000						100 %	92,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
7	01	02	2.02	01	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,500,000	35,574,000	30,319,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Dokumen	37,500,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	0	0	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	55,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	59,000,000	15,000,000	13,425,800					100 %	59,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59,000,000	15,000,000	13,425,800					1 Laporan	59,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	25 lembaga Kemasyarakatan	27,500,000	15,000,000	13,425,800	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	25 lembaga Kemasyarakatan	27,500,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31,500,000	0	0	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	31,500,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	216,700,000	162,800,000	160,695,000					100 %	145,200,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penanganan gangguan Trantibum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	143,000,000	92,400,000	92,400,000					1 Laporan	71,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143,000,000	92,400,000	92,400,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	12 Laporan	71,500,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan Test Tolak Ukur Indikator Keluaran Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	18,700,000	20,400,000	20,400,000					100 %	18,700,000		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18,700,000	20,400,000	20,400,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	18,700,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	50,000,000	47,895,000					1 Laporan	55,000,000		
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	50,000,000	47,895,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Laporan	55,000,000	Kecamatan Banjarnawangi	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	197,000,050	165,000,000	165,000,000					100 %	197,000,000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase Pelaksanaan Urusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	197,000,050	165,000,000	165,000,000					100 %	197,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKAT DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKAT DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
		Penugasan Kepala Daerah																			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	22,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	50 Orang	22,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	55,000,000	0	0	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	50 Orang	55,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,050	150,000,000	150,000,000	Kab. Garut, Banjarnawangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan	1 Dokumen	120,000,000	Kecamatan Banjarnawangi
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik		100 %	100 %	100 %	100 %	48,000,000	54,047,000	43,952,300					100 %	48,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian PERANGKA T DAERAH Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target PERANGKA T DAERAH Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	PERANGKAT DAERAH 2023	APBD 2023	PERANGKAT DAERAH 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
7	01	06	2.01		100 %	100 %	100 %	100 %	48,000,000	54,047,000	43,952,300						48,000,000				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,500,000	21,400,000	21,400,000	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan		10,500,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	21,000,000	28,000,000	17,905,300	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan		21,000,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16,500,000	4,647,000	4,647,000	Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Contoh Kelompok Sasaran Kegiatan		16,500,000	Kecamatan Banjarwangi
TOTAL											2,916,518,856	2,277,620,991	2,282,199,865							2,940,017,856	

Sumber : Rancangan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan PERANGKAT DAERAH Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1	:	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
PPD 2	:	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
PPD 3	:	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
PPD 4	:	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5	:	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
PPD 6	:	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
PPD 7	:	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
PPD 8	:	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan Banjarwangi adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut adalah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Banjarwangi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas	Prosentase	Meningkatnya	Indeks kepuasan	82,5

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pelayanan publik yang profesional dan amanah	pelayanan prima	kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	masyarakat	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	95
				Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Banjarwangi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,772,555,265
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7,478,400
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,478,400
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,456,614,065
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,447,651,465
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,962,600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,000,000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		108,152,800
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,940,000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,204,300
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,500,000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,430,000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,627,200
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,551,300
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,900,000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		45,000,000

			Daerah		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31,260,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,260,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		114,050,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,200,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,850,000
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			126,571,500
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		96,252,500
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,238,500
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83,014,000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		30,319,000
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30,319,000
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,425,800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			13,425,800

		DESA DAN KELURAHAN			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13,425,800
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	160,695,000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92,400,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			92,400,000
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		20,400,000
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20,400,000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		47,895,000
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	47,895,000
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		165,000,000
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	165,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15,000,000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		150,000,000
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	43,952,300

				Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43,952,300
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21,400,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			28,000,000
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		4,647,000
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
JUMLAH					2,282,199,865

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPERANGKAT DAERAH.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu Urusan Kewilayahan
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - j. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - k. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - l. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - m. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - n. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - o. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 33 subkegiatan;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- l. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- o. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- s. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- t. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- u. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- v. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- w. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,282,199,865,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023

(tabel disesuaikan dengan siPerangkat Daerah lama, Perangkat Daerah p-penetapan)

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banjarwangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banjarwangi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	Unsur Kewilayahan																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)
7	0	1			Kecamatan					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,277,620,991	2,282,199,865	DAU			2,940,017,856	
7	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,741,961,491	1,772,555,265	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	2,280,317,856	
7	0	1	0	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7,828,400	7,478,400	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	12,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
7 0 0 201 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7,828,400	7,478,400	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	12,500,000	
7 0 0 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,403,666,591	1,456,614,065	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	1,676,668,856	
7 0 0 202 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran Gaji dan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1,394,703,991	1,447,651,465	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunja	2 laporan	1,651,668,856	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah
			Tunjangan ASN														ngan ASN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		
7	010205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwangi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	8,962,600	8,962,600	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 laporan	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	10,000,000	10,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Orang	15,000,000	
7 0 1 0 1 205 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	15,000,000	
7 0 1 0 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	130,156,500	108,152,800	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	271,449,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 2.06 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6,940,000	6,940,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	12,000,000	
7 0 1 0 1 2.06 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	56,204,300	56,204,300	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	134,500,000	
7 0 1 0 1 2.06 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,500,000	12,500,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	12,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
7 0 1 0 1 2.06 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,430,000	6,430,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	25,700,000
7 0 1 0 1 2.06 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1,627,200	1,627,200	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 orang	2,250,000
7 0 1 0 1 2.06 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	23,155,000	9,551,300	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 laporan	23,700,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18,300,000	9,900,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 dokumen	56,000,000	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	5,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Jenis	4,799,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	45,000,000	45,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 unit	45,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum
7 0 0 1 1 2.07 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	45,000,000	45,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	45,000,000
7 0 0 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31,260,000	31,260,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	40,500,000
7 0 0 1 1 2.08 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,260,000	4,260,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,500,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	18,000,000	18,000,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Jenis	27,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	114,050,000	114,050,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	7 unit	219,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3,200,000	3,200,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Unit	19,200,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	110,850,000	110,850,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	200,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	138,812,500	126,571,500	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Kegiatan	210,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	012	2.01																	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwangi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	103,238,500	96,252,500	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	118,000,000	
7	012	2.01	01																
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwangi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,238,500	13,238,500	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	103,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
			Vertikal Terkait															
7	0102.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90,000,000	83,014,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	15,000,000
7	0102.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan PATEN	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35,574,000	30,319,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	92,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)
7	0	0	2.02	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35,574,000	30,319,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	37,500,000	
7	0	0	2.02	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	55,000,000	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	13,425,800	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	59,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)
7	0	0	2.01		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	25 lembaga Kemasyar akatan	25 lembaga Kemasyar akatan	25 lembaga Kemasyar akatan	25 lembaga Kemasyar akatan	25 lembaga Kemasyar akatan	25 lembaga Kemasyar akatan	15,000,00 0	13,425,80 0	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	25 lembaga Kemasyar akatan	59,000,000	
7	0	0	2.01	0	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,00 0	13,425,80 0	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	27,500,000	
7	0	0	2.01	0	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Peme	100 %	31,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)			
			Kecamatan																		
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	162,800,000	160,695,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	145,200,000
7	014	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92,400,000	92,400,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	71,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 4 2.01 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92,400,000	92,400,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	71,500,000	
7 0 1 0 4 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,400,000	20,400,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	18,700,000	
7 0 1 0 4 2.02 0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,400,000	20,400,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang	1 Laporan	18,700,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pemerintahan	yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														ang Urusan Pemerintahan		
7 0 1 0 4 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	47,895,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	55,000,000	
7 0 1 0 4 7.03 0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50,000,000	47,895,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	55,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Masyarakat																
7	0105																		
7	0105	2.01																	
7	0105	2.01	01																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Urusan Pemerintahan	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															Penunjang Urusan Pemerintahan			
7	01052	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Persentase Pemenuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwangi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan	1 Dokumen	55,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	
	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	DAU			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	120,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	54,047,000	43,952,300	DAU				100 %	48,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	
7 0 1 0 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Desa yang diberikan pengawasan dan pembinaan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	54,047,000	43,952,300	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Dokumen	48,000,000	
7 0 1 0 6 2.01 0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	21,400,000	21,400,000	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Laporan	10,500,000	
7 0 1 0 6 2.01 1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,000,000	17,905,300	DAU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	21,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah														
			katan																												
7	0 1 0 6 2.01 1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentas e Pemenuha n Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerinta han	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencana an Pembangu nan Partisipatif	Nilai/Pre dik at SAKIP	Kecamatan Banjarwan gi							4,647,000	4,647,000	DAU		Persen tase Pemen uhan Kebutu han Penunj ang Urusan Pemerin tahan		16,500,000												
TOTAL																							2,277,620, 991	2,282,199, 865							2,940,017,85 6

Sumber : PD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Garut.

Perubahan Perangkat Daerah yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN